

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Tauda, Gunawan. 2012. *Komisi Negara Independen Eksistensi Independent Agencis Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, M.. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimmly. 1997. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: ichtiar Baru-Van-Hoeve.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekertaris Jendral Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djaja, Ermansyah. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko, Prakoso. 1988. *Hukum Panintensier Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*. Yogyakarta: UII Press.
- Kusnardi, Moh dan Hermaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- M Hadjon Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahfud, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Simorangkir dan Pandjaitan. 1995. *Lapas Dalam Perspektif Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiarto, Said Umar. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Cetakan Ke-1.
- Wahyono, Padmo. 2003. *Ilmu Negara*. Jakarta: Ind Hill co cet III.
- Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Jajasan Prapanca.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Jurnal

- Ahmad Zazili*. (2012). "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (*Right to Vote*) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 1.
- Bayu Dwiwiddy Jatmiko*. (2018). "Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Pasca Perubahan UUD 1945". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 3, No 2.
- Hanum Hapsari*. (2018). "Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif". *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4, No. 3.

- Kholifatul Maghfiroh, Lita Tyesta A.L.W dan Retno Saraswati. (2018). "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD DAN DPRD Serta Sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah". Diponegoro Law Journal. Vol. 7, No. 2.*
- Luthfi Widagdo Eddyono. (2010). "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi. Vol. 7, No. 2.*
- Muhammad Saleh, Dimas Firdausy Hunafa. (2018). "Pemilu Berintegritas: Menggagas pencabutan Hak Poltik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilhan Umum". Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 4, No. 3.*
- Noer Sida. (2018). "Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan". Jurnal Hukum. Vol. 34, No. 2.*
- Novianti. (2018). "Implikasi Hukum Putusan MA Terhadap Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018". Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI .Vol. 10, No. 18.*
- Osgar S. Matompo. (2014). "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat". Jurnal Media Hukum. Vol. 21, No. 1.*
- Sunarto. (2016). "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 2.*

Makalah

- KontraS. 2017. Makalah: Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM. Jakarta. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Website

Aprialdo Rachman, "KPU Tidak Perlu Mundur Soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019"

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/11333141/kpu-tidak-perlu-mundur-soal-larangan-mantankoruptor-jadi-caleg-2019>, diakses tanggal 24 April 2019. Pukul 21.00.

<https://www.nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larang-eks-napi-korupsi-nyaleg>, diakses pada tanggal 3 September 2019 Pukul 21.02.

Laman resmi KPU RI dalam <https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpu-resmi-larang-mantan-koruptor-jadicaleg-pemilu-2019>, diakses pada Tanggal 3 September 2019 Pukul 20.12.

Tempo.com. 2015. *Ini 9 Bekas Napi yang Kini Jadi Calon Kepala Daerah*. <http://m.tempoco.com/read/news/2015/08/04/078689110/ini-9-napi-yangkini-jadi-calon-kepala-daerah>, diakses pada tanggal 4 November 2018 pukul 19.00.

The Institute for Criminal Justice Reform. Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik <http://icjr.or.id>, diakses tanggal 24 April 2019. Pukul 21.00.

Universal Declaration of Human Rights,
<http://www.un.org/en/document/udhr/index.shtml#a2>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pada Pukul 08.00

